

TESIS

**PANDEMI COVID-19 SEBAGAI *FORCE MAJEURE*
DALAM PERJANJIAN *LETTER OF CREDIT*
MENURUT UCP 600**



OLEH :

**NABILLA, S.H.
NIM. 032014153051**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**PANDEMI COVID-19 SEBAGAI *FORCE MAJEURE*
DALAM PERJANJIAN *LETTER OF CREDIT*
MENURUT UCP 600**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

**NABILLA, S.H.
NIM. 032014153051**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Ini Telah disetujui, Tanggal, 26 Januari 2022

Oleh Pembimbing Ketua



Prof. Koesrianti, S.H., L.L.M., Ph.D.
NIP. 196209081987012001

Pembimbing Kedua,



Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., L.L.M.
NIP. 198402172006041001

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tesis

Pada tanggal 24 Januari 2022

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Ghanshan Anand, S. H., M. Kn.

Anggota : Prof. Koesrianti, S.H., L.L.M., Ph.D.

Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., L.L.M.

Jani Purnawanty, S.H., S.S.,L.L.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nabilla, S.H.
NIM : 032014153051
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Minat Studi : Hukum Internasional
Judul : Pandemi COVID-19 sebagai *Force Majeure*
dalam Perjanjian *Letter of Credit* Menurut UCP
600

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METER', and 'TELUR'. The serial number 'F11A9AJX350849436' is visible at the bottom of the stamp.

Nabilla, S.H.
NIM. 032014153051

ABSTRAK

Nabilla

Penelitian ini mengkaji kriteria dan syarat suatu kondisi yang dapat didalilkan sebagai *force majeure* sehingga membatalkan pelaksanaan perjanjian dagang internasional menurut CISG, UCP 600, dan UPICC 2016 serta menganalisa pandemi COVID-19 sebagai *force majeure* berdasarkan CISG dan UPICC 2016.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan legal officer bank dan advokat yang memiliki spesialisasi di litigasi. Penelitian menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif.

Terdapat 2 hasil penelitian yaitu pertama, terdapat perbedaan antara pengaturan *force majeure* di CISG, UPICC 2016 dan UCP 600. Pasal 79 CISG menggunakan kata “*impediment beyond his control*” dan tidak menyebutkan kata *force majeure* secara spesifik. Kekurangan Pasal 79 CISG adalah CISG tidak mendefinisikan istilah ‘*impediment*’ sehingga menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Konsep *force majeure* pada Pasal 7.1.7 UPICC 2016 harus membuktikan bahwa *non-performance* (non-kinerja) terjadi karena adanya kendala/hambatan diluar kemampuannya yang tidak wajar yang tidak dapat diperkirakan untuk diperhitungkan ketika membuat perjanjian atau para pihak tidak dapat menghindari atau menanggulangnya konsekuensi dari kejadian yang diluar kemampuannya. Sedangkan Pasal 36 UCP 600 hanya mengatur terkait dengan pembayaran yang dilakukan oleh bank ketika terdapat L/C yang tidak sesuai dengan dalih terjadinya COVID-19 dan tidak terkait dengan *wanprestatie*.

Kedua, bank selalu melakukan pembayaran jika permintaan pembayaran sudah sesuai ketentuan dalam L/C tanpa dapat diganggu gugat oleh pihak yang melakukan pembayaran. Satu-satunya jalan yang dapat diambil oleh pembeli untuk mendapatkan kembali uang atas pembayaran yang telah dibayarkan adalah melalui gugatan *wanprestatie* di pengadilan bukan permohonan untuk pengadilan menerbitkan putusan sela dalam menghentikan secara sementara pembayaran L/C. Bahwa tidak ada standar objektif untuk penerapan Pasal 79 CISG maka COVID-19 sebagai peristiwa *force majeure* harus dilihat case per case basis karena penting untuk mengkaji kebijakan apa di negara terkait yang dapat menghambat pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya.

Kata kunci: *force majeure, hardship, letter of credit*

ABSTRACT

Nabilla

This study examines the criteria and conditions that can be postulated as force majeure to cancel the implementation of international trade agreements according to CISG, UCP 600, and UPICC 2016 and analyzes the COVID-19 pandemic as force majeure based on CISG and UPICC 2016.

This type of research is normative legal research. The approach is a statutory approach and a conceptual approach. Data collection methods are literature studies and interviews with bank legal officers and lawyers who specialize in litigation. This research is qualitative data analysis.

There are 2 research results, first, there are differences between the force majeure arrangements at CISG, UPICC 2016 and UCP 600. Article 79 of the CISG uses the word "impediment beyond his control" and does not mention the word force majeure specifically. The shortcoming of Article 79 of the CISG is that the CISG does not define the term 'impediment' which creates ambiguity and legal uncertainty. The concept of force majeure in Article 7.1.7 of UPICC 2016 must prove that non-performance occurs due to unreasonable obstacles beyond its capabilities that cannot be expected to be considered when making an agreement or the parties are unable to avoid or overcome the consequences from the impediment. Meanwhile, Article 36 of UCP 600 only regulates payments made by banks when there is an L/C that is not in accordance with the pretext of the occurrence of COVID-19 and is not related to event of default.

Second, bank always makes payments if the payment request is in accordance with the provisions in the L/C without being contested by the party making the payment. The only way for buyer to get the money back for the payment that has been paid is through a breach of contract lawsuit in court instead of an application for the court to issue an interlocutory decision to temporarily stop the L/C payment. There is no objective standard for the application of Article 79 of the CISG, COVID-19 as a force majeure event must be seen on a case-by-case basis because it is important to examine what policies in the relevant country can hinder business actors from carrying out their obligations.

Keywords: *force majeure, hardship, letter of credit*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkatNya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga;
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan selaku Anggota Tim Penguji Tesis;
4. Prof. Koesrianti, S.H., L.L.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis sekaligus Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis I (MKPT I);
5. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis;
6. Jani Purnawanty, S.H., S.S., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis II (MKPT II) dan Anggota Tim Penguji Tesis;
7. Dr. Ghanshan Anand, S. H., M. Kn. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
8. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan belajar, menyelesaikan Tesis dan menyelesaikan masa studi saya dengan baik, serta para petugas akademik Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

yang telah membantu saya dalam proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

9. Orang tua saya yang telah memberikan doa serta nasihat dalam belajar dan menyelesaikan Tesis ini;
10. Suami dan anak-anak saya tercinta yang telah mendoakan, membantu dan mendukung baik secara moril mau pun materiil;
11. Seluruh rekan-rekan seperjuangan;
12. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan Tesis ini.

Semoga penelitian Tesis ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 27 Januari 2022
Penyusun



Nabilla, S.H.

DAFTAR ISI

PANDEMI COVID-19 SEBAGAI <i>FORCE MAJEURE</i> DALAM PERJANJIAN <i>LETTER OF CREDIT</i> MENURUT UCP 600	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PANITIA PENGUJI TESIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Rumusan Masalah	9
1. 3. Tujuan Penelitian.....	10
1. 4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	11
1. 5. Tinjauan Pustaka	12
1.5.1. Tinjauan <i>Wanprestatie</i> dalam UPICC 2016 dan CISG	12

1.5.2.	Tinjauan atas <i>Force majeure</i> dan <i>Hardship</i> menurut Ketentuan Internasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”).....	15
1.5.3.	Tinjauan atas <i>Letter of Credit</i>	18
1. 6.	Metodologi Penelitian	21
1.6.1.	Tipe Penelitian Hukum	21
1.6.2.	Pendekatan.....	22
1.6.3.	Sumber Bahan Hukum.....	22
1.6.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
1.6.5.	Analisis Bahan Hukum.....	24
1.6.6.	Sistematika Penulisan	25
BAB II.....		27
	KRITERIA DAN SYARAT SUATU KONDISI DAPAT DIDALILKAN SEBAGAI <i>FORCE MAJEURE</i> YANG DAPAT MEMBATALKAN PELAKSANAAN PERJANJIAN DAGANG INTERNASIONAL MENURUT CISG, UCP 600, DAN UPICC 2016.....	27
2.1.	Perbedaan pendekatan <i>Common Law</i> dan <i>Civil Law</i> dalam pengaturan <i>Force Majeure</i>	29
2.2.	Pendekatan CISG dalam mengatur <i>Force Majeure</i> sebagai Dalil Para Pihak untuk Membatalkan Pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Internasional. 31	
2.3.	Pendekatan UPICC 2016 dalam mengatur <i>Force Majeure</i> sebagai Dalil Para Pihak untuk Membatalkan Pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Internasional	33

2.4.	Pendekatan UCP 600 dalam mengatur <i>Force Majeure</i> sebagai Dalil Para Pihak untuk Membatalkan Pembayaran <i>Letter of Credit</i>	34
2.5.	Kriteria dan Syarat <i>Force Majeure</i> sebagai Dalil Para Pihak untuk Membatalkan Pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Internasional dengan pembayaran melalui UCP	37
BAB III.....		28
WABAH PENYAKIT DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI <i>FORCE MAJEURE</i> ATAU <i>HARDSHIP</i> DALAM PERJANJIAN <i>LETTER OF CREDIT</i>		28
3.1.	Praktik <i>Letter of Credit</i> dalam Perdagangan Internasional dalam hal terjadi Pandemi COVID-19	28
3.2.	Pendekatan putusan Pengadilan Tinggi Bombay di <i>Standard Retail Pvt. Ltd vs Gs Global Corp and Ors</i> pada 8 April 2020 dalam menerapkan <i>Force Majeure</i> sebagai COVID-19 dalam Pembayaran L/C	43
3.3.	Perbedaan <i>Hardship</i> atau <i>Force Majeure</i> serta Kategorisasi Wabah Penyakit	46
3.4.	Pandangan CISG terkait Wabah Penyakit sebagai <i>Hardship</i> atau <i>Force Majeure</i>	55
BAB IV		41
PENUTUP		41
Daftar Bacaan.....		63